Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial
Volume 02, Nomor 11, June 2025, P. 502-508
E-ISSN: 3025-6704
DOI: https://doi.org/10.5281zenodo.15613605

Ekonomi Politik Ketahanan Pangan di Indonesia: Peran Negara Dalam Menghadapi Krisis Pangan

Merry Viona[1], Nabila[2], Deva Garcia Katanging[3], Mellyana Candra[4]
[1234]Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

ARTICLE INFO

Article history:
Received April 30, 2025
Revised May 23, 2025
Accepted May 28, 2025
Available online June 02, 2025

Keywords
Food security; political economy; state role; food crisis

Keywords:
Ketahanan pangan; ekonomi politik; peran negara; krisis pangan

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study examines the political economy dynamics of food security in Indonesia and the role of the state in addressing the food crisis. Food security is influenced by complex economic, political, bureaucratic, and socio-economic factors. The state plays a strategic role through subsidy policies, management of food reserves, import regulations, sustainable agricultural development, and food technology innovation. However, policy implementation faces obstacles such as corruption, power imbalances, and complex bureaucracy. Comparative studies with other countries highlight the importance of inclusive and multisectoral approaches. The study recommends bureaucratic reform, improved coordination, and strengthened social protection to achieve sustainable and equitable food security in Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dinamika ekonomi politik ketahanan pangan di Indonesia serta peran negara dalam menghadapi krisis pangan. Ketahanan pangan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, birokrasi, dan sosial-ekonomi yang kompleks. Negara berperan strategis melalui kebijakan subsidi, pengelolaan cadangan pangan, regulasi impor, pembangunan pertanian berkelanjutan, serta inovasi teknologi pangan. Namun, implementasi kebijakan menghadapi hambatan seperti korupsi, ketidakseimbangan kekuasaan, dan birokrasi yang rumit. Studi perbandingan dengan negara lain menunjukkan pentingnya pendekatan inklusif dan multisektoral. Rekomendasi penelitian menekankan reformasi birokrasi, peningkatan koordinasi, serta penguatan perlindungan sosial guna mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan merata di Indonesia.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Di Indonesia, dengan populasi yang sangat besar, tantangan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau menjadi sangat krusial. Ketahanan pangan tidak hanya terbatas pada aspek produksi dan distribusi, tetapi juga harus melibatkan akses ekonomi dan sosial yang merata serta menjamin keberlanjutan sistem pangan nasional untuk generasi mendatang.

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menghadapi krisis pangan yang disebabkan oleh berbagai faktor multidimensional. Gangguan rantai pasok global akibat pandemi COVID-19, perubahan iklim yang ekstrem, konflik geopolitik, serta kenaikan harga komoditas pangan internasional telah menjadi tantangan berat bagi ketahanan pangan global, termasuk Indonesia. Negara yang masih bergantung pada impor beberapa komoditas strategis ini merasakan dampak signifikan yang mengharuskan penyesuaian kebijakan dan strategi produksi domestik.

Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah sebenarnya memiliki potensi besar dalam menjaga ketahanan pangannya. Namun, tantangan struktural seperti kurang optimalnya distribusi, lemahnya infrastruktur pertanian, dan masalah akses ekonomi masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan intervensi negara yang kuat dan terarah untuk mengelola ketahanan pangan secara holistik, dengan pendekatan yang tidak hanya ekonomis tetapi juga sosial dan politik.

Peran negara sangat strategis dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan yang adaptif terhadap perubahan kondisi global dan domestik. Kebijakan ini harus mampu menjawab dinamika ekonomi politik yang kompleks, termasuk kepentingan berbagai aktor dan

Email: mviona@student.umrah.ac.id1, nnabila2@student.umrah.ac.id2, mellyana1001@gmail.com3

tekanan politik yang dapat memengaruhi stabilitas sosial dan keamanan nasional. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang hubungan antara ekonomi politik dan ketahanan pangan menjadi sangat penting.

Kebijakan pangan di Indonesia harus didasarkan pada analisis yang komprehensif mengenai pengaruh faktor-faktor ekonomi politik seperti kebijakan perdagangan, subsidi, regulasi agraria, serta alokasi anggaran negara. Selain itu, faktor eksternal seperti hubungan diplomatik dan kebijakan negara lain juga berpengaruh pada ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, sinergi antar lembaga dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pengelolaan pangan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana dinamika ekonomi politik mempengaruhi ketahanan pangan di Indonesia serta apa peran negara dalam menghadapi krisis pangan yang sedang berlangsung. Pertanyaan ini penting untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada serta untuk merancang solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara sistematis hubungan antara ekonomi politik dan ketahanan pangan serta mengkaji secara mendalam peran negara dalam mengatasi berbagai permasalahan pangan yang dihadapi Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan strategis dan praktis.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi peningkatan pemahaman akademis mengenai aspek ekonomi politik dalam konteks ketahanan pangan, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan relevan bagi pemerintah. Dengan demikian, hasil penelitian dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan ketahanan pangan yang lebih responsif terhadap tantangan nasional maupun global.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan penting bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam membangun ketahanan pangan nasional yang kokoh dan berkelanjutan, sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang fokus pada analisis kebijakan ketahanan pangan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika ekonomi politik serta peran negara dalam menghadapi krisis pangan yang kompleks dan kontekstual. Studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara holistik melalui berbagai sumber data yang relevan dan otentik.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi terhadap literatur dan dokumen resmi terkait kebijakan pangan, wawancara mendalam dengan pembuat kebijakan, serta pakar di bidang pangan dan ketahanan pangan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dalam dokumen dan hasil wawancara. Validitas data dijaga melalui triangulasi, yakni membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai sumber guna menghasilkan kesimpulan yang kredibel dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan konsep yang sangat penting dalam konteks pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi ketika seluruh individu pada setiap waktu memiliki akses fisik dan ekonomi yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi, dan sesuai dengan kebutuhan gizi untuk menjalani hidup yang aktif dan sehat. Definisi ini menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar masalah ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan pangan tersebut secara optimal.

Beberapa ahli turut mengembangkan definisi ketahanan pangan dengan penekanan pada dimensi-dimensi utama yang membentuknya. Pertama, ketersediaan pangan (availability) merujuk pada keberadaan pangan yang cukup dalam suatu wilayah melalui produksi domestik, impor, dan cadangan pangan. Aspek ini memastikan bahwa pangan tersedia secara fisik di pasar atau tempat distribusi yang memadai. Kedua, akses pangan (access) berkaitan dengan kemampuan individu atau rumah tangga untuk memperoleh pangan yang memadai secara ekonomi dan sosial.

Selain itu, pemanfaatan pangan (utilization) merupakan dimensi penting yang menekankan bagaimana tubuh manusia menggunakan pangan yang dikonsumsi, termasuk aspek gizi dan kesehatan. Pemanfaatan pangan yang baik membutuhkan pangan yang bergizi seimbang serta sanitasi dan pelayanan kesehatan yang memadai untuk mendukung penyerapan nutrisi. Terakhir, stabilitas (stability) mengacu

pada konsistensi ketersediaan dan akses pangan dalam jangka waktu yang panjang tanpa terganggu oleh faktor musiman, ekonomi, atau bencana.

Keempat dimensi tersebut saling berkaitan dan harus terpenuhi secara simultan agar ketahanan pangan dapat dicapai secara menyeluruh. Ketidakseimbangan pada salah satu dimensi dapat menyebabkan kerentanan pangan dan berisiko pada munculnya krisis pangan. Oleh karena itu, pendekatan ketahanan pangan harus bersifat komprehensif dan multisektoral, mengintegrasikan aspek produksi, distribusi, ekonomi, sosial, dan kesehatan.

Dalam konteks Indonesia, tantangan ketahanan pangan semakin kompleks dengan dinamika sosial-ekonomi, perubahan iklim, dan ketergantungan pada impor pangan strategis. Oleh sebab itu, pemahaman konsep ketahanan pangan yang holistik menjadi dasar penting untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif dalam memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kondisi Ketahanan Pangan Indonesia Saat Krisis

Kondisi ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan tantangan signifikan dalam aspek ketersediaan pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi diperkirakan mencapai 10,20 juta hektare dengan produksi gabah kering giling (GKG) sekitar 53,63 juta ton. Konversi menjadi beras untuk konsumsi penduduk diperkirakan sebesar 30,90 juta ton, mengalami penurunan 2,05% dibandingkan tahun sebelumnya . Penurunan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti konversi lahan pertanian, perubahan iklim, dan penurunan produktivitas.

Impor pangan menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Pada tahun 2023, Indonesia mengimpor beras sebanyak 3,5 juta ton, jumlah tertinggi sejak krisis moneter 1997. Angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2022 yang hanya 429 ribu ton . Selain beras, komoditas pangan lain seperti kedelai, jagung, dan gula juga diimpor dalam jumlah besar untuk menutupi kekurangan pasokan domestik.

Konsumsi pangan masyarakat Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan pola yang beragam. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), konsumsi beras per kapita diperkirakan mencapai 81,04 kg per tahun. Namun, konsumsi pangan lainnya seperti kacang-kacangan dan buah-buahan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai pola konsumsi yang lebih beragam dan bergizi seimbang .

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan skor 60,2, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 59,2. Meskipun ada peningkatan, posisi Indonesia masih berada di bawah rata-rata global dan Asia Pasifik, serta lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia . Hal ini mengindikasikan bahwa ketahanan pangan Indonesia masih rentan terhadap berbagai faktor eksternal dan internal.

Wilayah-wilayah tertentu di Indonesia masih menghadapi kerawanan pangan yang tinggi. Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA), terdapat 68 kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori rentan rawan pangan pada tahun 2023. Penyebab utama kerawanan pangan di wilayah tersebut antara lain rendahnya produksi pangan lokal, tingginya prevalensi stunting, akses air bersih yang terbatas, dan tingginya angka kemiskinan .

Upaya pemerintah dalam mengatasi krisis pangan antara lain melalui program bantuan pangan, stabilisasi harga, dan penguatan cadangan pangan pemerintah. Pada tahun 2023, Badan Pangan Nasional menyalurkan bantuan pangan berupa beras, telur, dan daging ayam ke daerah-daerah rawan pangan. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan pengawasan distribusi pangan dan memperkuat sistem logistik pangan untuk memastikan ketersediaan pangan yang merata di seluruh wilayah .

Meskipun terdapat upaya dan capaian dalam meningkatkan ketahanan pangan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai kemandirian pangan. Penurunan produksi domestik, ketergantungan pada impor, dan ketimpangan distribusi pangan menjadi isu utama yang perlu segera ditangani. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dinamika Ekonomi Politik dalam Ketahanan Pangan

Dinamika ekonomi politik memainkan peran sentral dalam menentukan arah dan efektivitas ketahanan pangan di Indonesia. Ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada faktor produksi dan distribusi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Politik pangan mencakup proses negosiasi dan pertarungan kepentingan antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, kelompok produsen, pedagang, dan konsumen, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pangan nasional.

Salah satu aspek penting dalam dinamika ini adalah kebijakan subsidi pangan. Pemerintah Indonesia selama ini memberikan subsidi untuk komoditas pangan strategis seperti beras dan pupuk guna menjaga stabilitas harga dan mendukung petani. Namun, kebijakan subsidi sering kali menjadi arena politik

yang kompleks karena terkait dengan alokasi anggaran dan kepentingan kelompok tertentu. Subsidi yang tidak tepat sasaran dapat menyebabkan distorsi pasar dan ketidakefisienan, sementara tekanan politik untuk mempertahankan subsidi menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam melakukan reformasi.

Selain itu, kebijakan impor pangan juga menjadi isu yang sangat politis. Di satu sisi, impor dianggap sebagai solusi untuk menutupi kekurangan pasokan pangan domestik agar harga tetap stabil dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Namun, di sisi lain, impor pangan kerap menimbulkan resistensi dari petani lokal yang merasa dirugikan oleh persaingan produk impor yang lebih murah. Konflik kepentingan ini sering mempengaruhi keputusan politik terkait volume dan mekanisme impor, yang berdampak pada ketahanan pangan jangka panjang.

Perdagangan pangan dalam negeri juga merupakan arena yang dipenuhi oleh berbagai kepentingan politik dan ekonomi. Peran pedagang besar dan jaringan distribusi sering menjadi titik kritis dalam menentukan ketersediaan dan harga pangan di pasar. Praktik monopoli atau oligopoli dalam distribusi pangan dapat menyebabkan kenaikan harga yang tidak proporsional, mengurangi akses masyarakat terhadap pangan yang terjangkau, serta menimbulkan ketidakadilan ekonomi yang berujung pada kerentanan pangan masyarakat miskin.

Dalam konteks pengambilan keputusan pangan, aktor-aktor ekonomi dan politik berperan secara simultan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki posisi strategis dalam merumuskan regulasi dan kebijakan fiskal yang mendukung ketahanan pangan. Namun, keputusan politik seringkali dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok kepentingan seperti asosiasi petani, perusahaan agribisnis, dan importir. Interaksi ini menciptakan dinamika yang kompleks dan terkadang bertentangan, sehingga kebijakan yang dihasilkan harus mampu menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak.

Lebih jauh, adanya desentralisasi pemerintahan di Indonesia menambah lapisan kompleksitas dalam dinamika ekonomi politik ketahanan pangan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan pangan di wilayahnya, yang dapat mempercepat respons terhadap kebutuhan lokal. Namun, hal ini juga berpotensi menimbulkan fragmentasi kebijakan dan ketidaksesuaian dengan kebijakan nasional, terutama bila terdapat perbedaan kepentingan politik antara pemerintah pusat dan daerah.

Peran media dan opini publik juga tidak kalah penting dalam mempengaruhi dinamika ekonomi politik pangan. Isu-isu seperti kelangkaan pangan, kenaikan harga, dan dampak impor sering menjadi bahan perdebatan publik yang memengaruhi persepsi masyarakat dan tekanan politik terhadap pemerintah. Pemerintah harus mampu mengelola komunikasi dan transparansi kebijakan pangan agar mendapat dukungan publik serta meminimalisasi ketegangan sosial yang dapat memperburuk krisis pangan.

Dinamika ekonomi politik ketahanan pangan di Indonesia menunjukkan bahwa aspek ekonomi dan politik tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan pangan nasional. Kebijakan yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif, dengan memperhatikan kepentingan semua aktor serta menjaga keseimbangan antara produksi lokal, stabilitas harga, dan akses pangan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan utama yang harus dijawab oleh pemerintah agar ketahanan pangan dapat terwujud secara berkelanjutan dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peran Negara dalam Menghadapi Krisis Pangan

Peran negara dalam menghadapi krisis pangan di Indonesia sangat krusial mengingat ketahanan pangan merupakan bagian dari kedaulatan nasional. Negara bertanggung jawab memastikan ketersediaan, akses, dan stabilitas pangan bagi seluruh rakyat melalui berbagai kebijakan dan program strategis. Dalam konteks krisis pangan, intervensi negara diperlukan untuk mengelola ketidakseimbangan pasokan dan permintaan serta mengatasi kerentanan yang muncul akibat faktor eksternal maupun internal.

Salah satu kebijakan utama pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan adalah pemberian subsidi kepada sektor pertanian dan pangan. Subsidi pupuk, benih, dan harga pembelian hasil pertanian seperti beras, memberikan insentif bagi petani agar produksi pangan nasional tetap terjaga. Kebijakan ini juga bertujuan menstabilkan harga pangan agar tetap terjangkau bagi masyarakat luas. Namun, pemerintah harus memastikan subsidi ini tepat sasaran dan efisien agar tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan serta mendukung keberlanjutan produksi.

Selain subsidi, pemerintah juga membangun dan mengelola cadangan pangan strategis sebagai buffer stock yang dapat diaktifkan saat terjadi gangguan pasokan. Cadangan ini tidak hanya berupa beras, tetapi juga komoditas lain seperti jagung dan gula. Pengelolaan cadangan pangan yang baik memungkinkan pemerintah merespons cepat terhadap fluktuasi harga dan kelangkaan pangan, sehingga dampak krisis dapat diminimalisasi. Namun, manajemen cadangan pangan memerlukan sistem yang transparan dan akuntabel agar tidak terjadi kebocoran dan penumpukan stok yang tidak produktif.

Regulasi impor pangan juga menjadi instrumen penting dalam strategi negara menghadapi krisis pangan. Pemerintah mengatur kuota, kualitas, dan harga impor untuk memastikan pasokan pangan

nasional tetap terpenuhi tanpa merugikan petani domestik. Kebijakan impor yang fleksibel dan responsif memungkinkan pemerintah mengantisipasi kekurangan pangan akibat faktor produksi yang tidak stabil, seperti cuaca ekstrem atau serangan hama. Namun, pengaturan impor harus diimbangi dengan kebijakan penguatan produksi dalam negeri agar ketergantungan impor dapat dikurangi secara bertahap.

Dalam jangka panjang, pembangunan pertanian berkelanjutan menjadi fokus utama pemerintah untuk meningkatkan kemandirian pangan. Pemerintah mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan, efisien, dan produktif melalui pelatihan, penyediaan sarana produksi, serta pengembangan irigasi dan infrastruktur pertanian. Pendekatan ini tidak hanya menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga melindungi sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

Inovasi teknologi pangan juga menjadi bagian dari strategi negara dalam menghadapi krisis pangan. Pemerintah melalui lembaga penelitian dan kerjasama dengan sektor swasta mengembangkan teknologi pertanian modern seperti benih unggul tahan iklim, mekanisasi pertanian, serta teknologi pengolahan dan penyimpanan pangan. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi kehilangan pascapanen, dan memperpanjang masa simpan pangan, sehingga mendukung stabilitas pasokan dan kualitas pangan.

Koordinasi antar lembaga pemerintah menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ketahanan pangan. Pemerintah pusat, daerah, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan instansi terkait lainnya harus bekerja sinergis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program ketahanan pangan. Kolaborasi ini penting untuk mengintegrasikan berbagai aspek mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan secara efektif dan efisien.

Selain itu, kerjasama internasional juga turut memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi krisis pangan global. Melalui kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara lain dan organisasi internasional, Indonesia dapat mengakses teknologi, investasi, serta bantuan pangan saat darurat. Kerjasama ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam pengembangan sistem pangan global yang lebih adil dan berkelanjutan.

Peran negara dalam menghadapi krisis pangan di Indonesia sangat komprehensif dan multidimensional. Melalui kebijakan subsidi, cadangan pangan, regulasi impor, pembangunan pertanian berkelanjutan, inovasi teknologi, koordinasi lintas lembaga, dan kerjasama internasional, pemerintah berupaya menjaga ketahanan pangan sebagai pondasi stabilitas sosial dan pembangunan nasional. Tantangan yang ada mengharuskan pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan agar ketahanan pangan dapat terwujud secara berkelanjutan dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tantangan dan Hambatan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan

Implementasi kebijakan ketahanan pangan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari aspek birokrasi, korupsi, ketidakseimbangan kekuasaan, maupun kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Meskipun pemerintah telah merancang kebijakan dan program yang komprehensif, hambatan-hambatan ini seringkali menghambat efektivitas pelaksanaannya dan mengurangi dampak positif yang diharapkan.

Faktor birokrasi menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan. Sistem administrasi yang panjang dan berlapis-lapis serta koordinasi antar instansi yang kurang optimal menyebabkan lambatnya respons terhadap kebutuhan pangan di lapangan. Ketidaksesuaian regulasi di tingkat pusat dan daerah juga menimbulkan ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab, yang berujung pada tumpang tindih atau bahkan konflik antar lembaga.

Korupsi merupakan masalah serius yang melemahkan implementasi kebijakan pangan. Praktik korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penyalahgunaan dana subsidi, manipulasi pengadaan pangan, hingga penyalahgunaan cadangan pangan strategis. Korupsi tidak hanya mengurangi efisiensi anggaran pemerintah, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan distribusi pangan sehingga masyarakat rentan sulit mendapatkan akses pangan yang memadai.

Ketidakseimbangan kekuasaan antara kelompok elit politik dan ekonomi juga menjadi penghambat dalam pengelolaan ketahanan pangan. Kelompok dengan pengaruh besar seringkali mendominasi proses pengambilan keputusan, yang terkadang mengabaikan kepentingan petani kecil dan konsumen miskin. Kondisi ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan cenderung berpihak pada kelompok tertentu dan memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi di sektor pangan.

Selain itu, tantangan sosial-ekonomi masyarakat turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan ketahanan pangan. Tingginya angka kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan terbatasnya akses terhadap teknologi pertanian menyebabkan sebagian besar petani kecil kesulitan meningkatkan produktivitas. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya akses permodalan dan pasar, yang membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga dan kegagalan panen.

Ketimpangan distribusi pangan juga menjadi hambatan signifikan dalam memastikan akses pangan yang merata. Infrastruktur transportasi yang belum merata dan lemahnya sistem logistik menyebabkan

tingginya biaya distribusi, terutama di wilayah terpencil. Akibatnya, harga pangan di daerah-daerah tersebut lebih mahal dan pasokan tidak selalu stabil, memperburuk kerawanan pangan lokal.

Tantangan budaya dan perilaku masyarakat juga mempengaruhi implementasi kebijakan. Perubahan pola konsumsi dan kebiasaan produksi yang tidak ramah lingkungan masih sulit diubah tanpa pendekatan edukasi dan partisipasi masyarakat yang memadai. Oleh karena itu, keterlibatan aktif komunitas dan peningkatan literasi pangan menjadi hal yang penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan.

Studi Perbandingan dengan Negara Lain: Pelajaran dari Negara Lain dalam Menghadapi Krisis Pangan

Menghadapi krisis pangan bukanlah tantangan yang unik bagi Indonesia, melainkan isu global yang juga dialami oleh banyak negara di berbagai belahan dunia. Studi perbandingan dengan beberapa negara lain dapat memberikan pelajaran berharga mengenai strategi efektif dan inovatif dalam mengelola ketahanan pangan di tengah krisis. Negara-negara tersebut menerapkan pendekatan yang berbeda sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik masing-masing, namun prinsip dasar ketahanan pangan tetap menjadi fokus utama.

Singapura, misalnya, sebagai negara dengan keterbatasan lahan pertanian, menempatkan inovasi teknologi dan diversifikasi sumber pangan sebagai strategi utama. Mereka mengembangkan urban farming, teknologi hidroponik, serta impor pangan dari berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat efisien. Pendekatan ini menegaskan pentingnya integrasi teknologi tinggi dan kemitraan internasional dalam menjaga ketersediaan pangan di negara yang sangat bergantung pada impor.

Sementara itu, Brasil menunjukkan keberhasilan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan yang melibatkan petani kecil dan komunitas lokal. Program-program pemerintah di Brasil mengedepankan pemberdayaan petani melalui akses permodalan, pelatihan teknologi pertanian ramah lingkungan, dan pembentukan koperasi tani. Pendekatan inklusif ini tidak hanya meningkatkan produksi pangan tetapi juga memperkuat kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan di sektor pertanian.

Di Eropa, Uni Eropa (UE) menerapkan kebijakan Common Agricultural Policy (CAP) yang mengatur subsidi dan insentif bagi petani dengan standar lingkungan dan sosial yang ketat. Kebijakan ini mengedepankan keseimbangan antara produktivitas dan pelestarian lingkungan serta menjamin stabilitas harga pangan melalui mekanisme pasar bersama. Model ini menekankan pentingnya regulasi yang jelas dan terintegrasi dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.

Negara-negara seperti India juga menghadapi tantangan ketahanan pangan yang sangat besar dengan populasi yang padat dan ketimpangan sosial yang tinggi. India menerapkan program Program Food Security Act yang memberikan jaminan pangan bagi penduduk miskin melalui sistem distribusi publik yang luas. Meskipun menghadapi masalah birokrasi dan kebocoran dalam distribusi, program ini menegaskan pentingnya perlindungan sosial sebagai aspek utama dalam ketahanan pangan.

Pelajaran dari berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan menghadapi krisis pangan tidak hanya bergantung pada kemampuan produksi, tetapi juga pada pengelolaan distribusi, perlindungan sosial, inovasi teknologi, dan kebijakan yang inklusif. Pendekatan multisektoral dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat sipil menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh.

Indonesia dapat mengadopsi berbagai strategi tersebut dengan menyesuaikan konteks lokal dan karakteristik sosial-ekonomi nasional. Pengembangan teknologi pertanian modern, penguatan peran petani kecil, pengelolaan subsidi yang efektif, serta peningkatan infrastruktur distribusi adalah langkah-langkah yang relevan. Selain itu, pembangunan sistem perlindungan sosial pangan yang kuat dapat mengurangi kerentanan masyarakat miskin terhadap guncangan harga dan pasokan.

Studi perbandingan ini memperlihatkan bahwa ketahanan pangan memerlukan kebijakan yang komprehensif dan adaptif. Pembelajaran lintas negara membuka wawasan bagi Indonesia untuk terus melakukan inovasi dan reformasi kebijakan, sehingga mampu menghadapi tantangan krisis pangan dengan lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

SIMPULAN

Ketahanan pangan di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, yang tidak hanya terkait dengan aspek produksi dan distribusi, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika ekonomi politik, birokrasi, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Peran negara sangat strategis dalam mengelola kebijakan subsidi, cadangan pangan, regulasi impor, pembangunan pertanian berkelanjutan, serta inovasi teknologi pangan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan nasional. Namun, hambatan seperti korupsi, ketidakseimbangan kekuasaan, dan birokrasi yang rumit masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan yang efektif.

Untuk memperkuat ketahanan pangan, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel serta memberantas praktik korupsi yang merugikan sektor pangan. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas lembaga dan pemerataan akses sumber daya kepada petani kecil agar produksi pangan domestik dapat meningkat secara berkelanjutan. Penerapan teknologi inovatif dan pembangunan sistem distribusi yang efisien juga harus didukung secara serius. Terakhir, pengembangan program perlindungan sosial yang inklusif akan memperkuat daya tahan masyarakat miskin terhadap dampak krisis pangan dan memastikan pemerataan akses pangan yang adil.

REFERENSI

Achmad Suryana. Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan Dan Penanganannya. (2024). Forum Penelitian Agro Ekonomi, 32(2), 123-135. https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/index.php/fae/article/view/1123

Amin, M., Amanwinata, R., & Pantja Astawa, I. G. (2021). POLITIK HUKUM BIDANG PANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 3(1), 150-167. https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.714

Diani Kesuma, Permasalahan Terkait Kuantitas Regulasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara, Jurnal Selisik - Volume 7, Nomor 1, Juni 2021, hlm 135. Accessed online from: http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/download/2431/1347/.

Simanjuntak, A. H., & Erwinsyah, R. G. (2020). KESEJAHTERAAN PETANI DAN KETAHANAN PANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19: TELAAH KRITIS TERHADAP RENCANA MEGAPROYEK LUMBUNG PANGAN NASIONAL INDONESIA. Sosio Informa, 6(2), 184–204. https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2332

Agarwal, B. (1997). â€œBargainingâ€ and Gender Relations: Within and Beyond the Household. Feminist Economics, 3(1), 1â€“51. https://doi.org/10.1080/135457097338799

Borras, S. M., Hall, R., Scoones, I., White, B., & Wolford, W. (2011). Towards a better understanding of global land grabbing: An editorial introduction. Journal of Peasant Studies, 38(2), 209â€“216. https://doi.org/10.1080/03066150.2011.559005

CastaÃ±eda, A., Doan, D., Newhouse, D., Nguyen, M. C., Uematsu, H., & Azevedo, J. P. (2016). Who are the Poor in the Developing World? The World Bank. https://doi.org/10.1596/1813-9450-7844

Clapp, J. & Moseley, W.G. (2020): This food crisis is different: COVID-19 and the fragility of the neoliberal food security order. The Journal of Peasant Studies, (2020), 1-25. https://doi.org/10.1080/03066150.2020.1823838

Dawe, D. (Ed.). (2012). The Rice Crisis: Markets, Policies and Food Security (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781849776684

Doak, C. M., Adair, L. S., Bentley, M., Monteiro, C., & Popkin, B. M. (2005). The dual burden household and the nutrition transition paradox. International Journal of Obesity, 29(1), 129â€“136. https://doi.org/10.1038/sj.ijo.0802824

Elmhirst, R., Siscawati, M., Basnett, B. S., & Ekowati, D. (2017). Gender and generation in engagements with oil palm in East Kalimantan, Indonesia: Insights from feminist political ecology. The Journal of Peasant Studies, 44(6), 1135â€“1157. https://doi.org/10.1080/03066150.2017.1337002Conroy, K., Sandel, M., & Zuckerman, B. (2010). Poverty Grown Up: How Childhood Socioeconomic Status Impacts Adult Health: Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 31(2), 154â€“160. https://doi.org/10.1097/DBP.0b013e3181c21a1b

Ariningsih E, Rachman HP. Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Rawan Pangan. Analisis Kebijak. Pertan. [Internet]. 2016 Aug. 31 [cited 2025 May 30];6(3):239-55. Available from: https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/index.php/akp/article/view/713